



## Pempus Batal Transfer DAK Akibat Covid-19

▶ Fransiskus: Kondisi Ini Dilematis



**Fransiskus**

Wakil Ketua DPRD Bengkayang

Memang dilematis yang kita hadapi, karena tahun ini kita menghadapi wabah yang tidak diduga. Sehingga beberapa program terpaksa ditunda.

**BENGKAYANG, SP** – Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus mengatakan akibat pandemi virus corona (Covid-19) sebagian dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk Pemkab Bengkayang tahun 2020 tidak ditransfer.

Selain itu, kata dia, beberapa program dari pemerintah daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD tahun 2020 terpaksa ditunda pelaksanaannya.

“Memang dilematis yang kita hadapi, karena tahun ini kita menghadapi wabah yang tidak diduga. Sehingga beberapa program terpaksa ditunda,” kata Fransiskus, Jumat (8/5).

Beberapa program yang sudah disetujui oleh kalangan eksekutif dan legislatif salah satunya dijelaskan Fransiskus adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), karena pandemi Covid-19, dana tersebut tidak jadi ditransfer ke daerah.

“Hanya yang ditransfer itu DAK Pendidikan dan DAK Kesehatan. Itu pun di luar dari gedung olahraga dan gedung kantor yang pe-

manfaatannya tidak terlalu *urgen* dulu,” ujar Fran.

Selain DAK kata Fransiskus Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai laporan bupati terjadi pemangkasan 13,6 persen.

“Ini juga menjadi salah satu kendala kita di daerah menenggarakan program-program pemerintah. Sekarang kita diminta lagi rasionalisasi kegiatan 35 persen sampai 50 persen. Semua yang bersifat belanja barang, jasa dan modal, dan perjalanan dinas kita pangkas semua. Semua ini juga dalam menangani Covid-19,” jelas Fransiskus.

Kata Fransiskus, semua program terfokus ke penanganan Covid-19. Namun ia memprediksi pandemi Covid-19 mulai menurun ada Mei-Juni. Jika ini terwujud maka kegiatan lain dan anggaran yang sudah disisihkan tidak digunakan.

“Namun Jika ini berlanjut terus kita tentu akan mencari langkah-langkah tertentu. Dan saya yakin pasti ada pemangkas-pemangkasan lagi. Jika begitu di daerah bisa stagnan, bersyukur kalau gaji bisa diberi

kalau tidak,” ungkap Fransiskus.

Selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), kegiatan lain di DPRD adalah penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda). Padahal ini penyusunan Raperda diakuinya sangat *urgen*.

“Perda-perda kan *urgen*. Tapi kondisi seperti ini mau tak mau kita tunda, sebagian anggaran kita pangkas,” ucapnya.

Dampak lain yang dialami di kalangan DPRD akibat Covid-19 terkait pelaksanaan kegiatan *reses* para wakil rakyat. *Reses* umumnya mengumpulkan banyak orang sementara hal tersebut sekarang ini tidak dapat dilakukan akibat Covid-19.

“Karena tidak boleh ngumpulkan orang banyak, kegiatan kita tunda sampai situasi aman. Saya juga sudah menyurati BPK, menyarakan *reses* dilakukan *door to door* untuk menampung aspirasi masyarakat,” ucap Fransiskus.

“Kalau itu tidak dilakukan kita juga diberi-

